

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap SDM yang ada dalam lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif otonomi daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *good governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu¹

¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintahan Daerah"

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat.

Sejak berlakunya otonomi daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang besar, kemudian disertai dengan transfer kepegawaian, pendanaan dan aset yang besar pula. Di tengah semangat membangun otonomi daerah, ada hal ironis bahwa kewenangan dan sumberdaya besar yang dimiliki kabupaten/kota kurang berdampak pada pemberdayaan kecamatan. Padahal kecamatan ini lah yang semestinya diposisikan sebagai “ujung tombak” pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi boleh saja menjadi *domain* pemerintah kabupaten/kota, namun *frontline* dari sebagian fungsi pelayanan mestinya diserahkan kepada kecamatan, disamping kepada dinas daerah/lembaga teknis daerah. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih mengedepankan fungsi-fungsi *steering* seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian, dari pada fungsi *rowing* atau penyelenggaraan langsung suatu urusan. Dari perspektif pemerintahan dan pelayanan publik, pendelegasian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.²

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Siberut selatan yaitu, tuntutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menemui kendala akibat tidak jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Hal ini dapat dilihat pada kewenangan pengelolaan kebersihan. Pada penyelenggaraan kewenangan pengelolaan kebersihannya itu pengangkutan sampah dari sumber (rumah tangga) ke TPS , Kecamatan Siberut Selatan berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan belum ada batasan yang jelas mengenai pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan salah satu kewenangan yang dinilai belum cukup optimal karena penerapan *good governance* belum di jalankan dengan baik dan benar.

Sebagian besar urusan pelayanan publik yang ditangani kecamatan hanyalah berupa rekomendasi untuk dilanjutkan ke pemerintah kota. Hal ini jelas mengakibatkan dilema bagi kecamatan, disatu sisi ingin memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat ,namun di sisi lain terhambat oleh sedikitnya kewenangan untuk menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk itu adalah pendelegasian kewenangan

² Tri widodo W. utomo, 2004.,*pendelegasian kewenangan pemerintah daerah kepada kecamatan dan kelurahan.*. Bandung:: "Diklat Penataan Kelembagaan pemerintah daerah.:" PkP2AI .hal.1

bupati/walikota kepada camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan.

Diharapkan dengan adanya pendelegasian kewenangan ini beberapa pelayanan publik seperti pemberian izin dan pelayanan non perizinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas.

Hal ini disebabkan oleh tujuan utama dari pendelegasian kewenangan kepada Camat adalah untuk mempercepat proses sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pada saat yang bersamaan, kebijakan ini akan meringankan beban pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan umum diharapkan akan semakin efektif dan efisien.

Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat ini juga merupakan amanat dari UU No.44 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.³

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat dinilai sangat beralasan dilaksanakan, karena dengan adanya tanggung jawab yang luas dan besar diemban oleh bupati/walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tidak mungkin bupati /walikota mampu melaksanakan tugasnya dikecamatan⁴ sehingga memerlukan peran camat untuk melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

Berdasarkan laporan dalam operasionalisasinya masih dijumpai permasalahan sehingga kesan tidak optimal masih terlihat dari kebijakan tersebut. Dengan mengacu pada latar belakang penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN KEWENAGAN CAMAT DIKECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAAUN MENTAWAI”**.

1.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan gambaran terhadap penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini memberikan perbandingan terhadap

³ Peraturan bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 44 tahun 2014 pasal 1 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.

⁴sumber: *journal.uir.ac.id*

penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. tujuannya adalah untuk menegaskan, posisis penelitian sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu :

1. Penelitian oleh **Pahrizal Iqrom** (20017) *Peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta menganalisis data, yang mendapatkan gambaran yang sesuai atau yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari

aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status dalam kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Peran menurut kamun besar bahasa Indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan baik partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, bahwa Camat mampu mewujudkan prinsip *good governance*. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan *good governance* yang lebih baik. Camat Batukliang Utara dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahannya. Dan Camat Batukliang Utara telah mampu mewujudkan prinsip *Good Governance* meski masih ada kekurangan yang hanya sebagian kecil. *Sumber: ejournal.unwmataram.ac.id.*

2. Penelitian oleh **Dezka Zulkarnain** (2020) *Peranan Camat dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dikantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyiapkan data serta

menganalisis data, yang mendapatkan gambaran yang sesuai atau yang jelas mengenai masalah yang diteliti. *good governance* merupakan proses penyelenggara kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip responsif (cepat tanggap) keadilan, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat ditentukan peran pemimpin karena pemimpin adalah desainer sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinnya, dimana maju dan mundurnya sebuah daerah tertentu berad pada kreatifitas seorang pemimpin. Pemimpin merupakan tomboak dari suatu kelompok masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan. Peranan Camat Buru dalam mewujudkan *Good Governance* baik dalam partisipasi, daya tanggap, transparansi, sudah mampu dilakukannya meskipun masih terdapat kekurangan hanya sebagian kecil. SDM memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan *Good Governance* yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Buru.

Sumber: journal.uir.ac.id.

Tabel 1.1
Matriks Penelitian

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodologi	Hasil penelitian
Pahriza l Iqrom (2017)	“Peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance”	Menurut Thoha peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang . Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan.	Metode penelitian deskriptif Kualitatif	Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktivitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status dalam kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Peran menurut kamun besar bahasa indonesia adalah menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodol ogi	Hasil penelitian
				<p>memegang pimpinan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan baik partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, bahwa camat mampu mewujudkan prinsip good governance. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan good governance yang lebih baik. Informan dalam penelitian ini</p>

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodol ogi	Hasil penelitian
				<p>sebanyak empat orang diambil dari pejabat sekretaris camat, subbagian pemerintah, masyarakat dan kepegawaian subbgian perwakilan pemerintah desa. Maka berdasarkan informan dapan disimpulkan hasil penelitian bahwa camat batukliang utara sudah mampu menjalankan tugas dan wewenang untuk mengkoordinasi dan mengawasi pelayanan pemerintah</p>

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodologi	Hasil penelitian
				dikabupaten yang memiliki peran penting dalam mencapai good governance.
Deska zul kar nai n (20 20)	“Peranan Camat dalam mewu judka n Tata Pemer intaha n yang baik (Good Gover nance) dikant or Keca matan Buru Kabup aten Karim un Propin si Kepul	Peranan merupaka n suatu penampil an atau tingkah laku tertentu dari seseorang atau sekelomp ok berdasark an keduduka n yang dimilikin ya sesuai dengan lingkunga n dalam melaksan akan tugas untuk	Metode penel itian deskriptif kualitatif	Good governance merupakan proses penyelenggara an kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah prinsip responsif (cepat tanggap) keadilan, partisipasi,aku ntabilitas, dan transparansi. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Metodologi	Hasil penelitian
	aun Riau”	tujuan tertentu. Peranan adalah khas yang dipentask an yaitu tindakan oleh individu dalam keduduka nnya (koentjar aningrat, 1991:172)		(good governance) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksnakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah ilayah yang dipimpinnya, dimana maju dan mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin. Pemimpin

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodol ogi	Hasil penelitian
				<p>merupakan titik tombak dari suatu kelompok /masyarakat maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembangunan. berdasarkan hasil besarnya persentase data yang telah diolah bahwa Camat buru telah melaksanakan berbagai perannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan,</p>

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodol ogi	Hasil penelitian
				<p>dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi. Peranan camat baru dalam mewujudkan good governance yaitu transparan, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, camat baru telah mampu mewujudkan prinsip good governance meskipun masih ada kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki</p>

Peneliti an	Judul peneli tian	Teori	Meteodol ogi	Hasil penelitian
				peranan yang sangat besar untuk mewujudkan good governance yang lebih baik lagi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Siberut Selatan?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan camat dengan Prinsip *Good Governance* di Kecamatan Siberut Selatan?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewenangan Camat dengan prinsip *Good Governance* di Kecamatan Siberut Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip *Good Governace* dalam pelaksanaan kewenangan Camat di Kecamatan Siberut Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan Camat dengan prinsip *Good Governancedi* Kecamatan Siberut Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan kewenangan Camat dengan prinsip *Good Governance* di Kecamatan Siberut Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dan pengamatan secara langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi diperguruan tinggi khususnya dibidang Ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan.

3. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi kalangan pemerintahan khususnya di Kecamatan Siberut Selatan.